

PENGARUH *FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI KASUS PERIODE 2011-2017)

Febriana Firdayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Febriana.firdayanti@gmail.com

Muhammad Taufiq Hidayat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
taufikhidayat@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The picture of regional independence in the era of autonomy is reflected in the ability of regions in the field of financial resources. Regional Original Income (PAD) should be the main financial source of the Regional Government. However, the increase in central government transfers, especially the general allocation fund (DAU), triggered spending that was greater than the increase in PAD. This condition is called the flypaper effect phenomenon. This study aims to analyze the effect of General Allocation Funds and Regional Original Revenues on Regional Expenditures and then analyze the Flypaper effect. This type of research is quantitative research. The population in this study is the Surabaya City Government. Determination of the sample uses sampling techniques with saturated sampling, where all members of the population are used as samples of the 2011-2017 Budget Realization Report. Data collected is secondary data with documentation method. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the General Allocation Fund variable in a persial manner does not have a significant effect on Regional Expenditures as evidenced by the results of a significantly greater value ($0.914 > 0.05$), whereas Regional Original Revenues significantly influence Regional Expenditure as evidenced by a significantly smaller value level ($0,000 < 0,05$). Simultaneously General Allocation Funds and Regional Original Revenues have a significant effect on Regional Expenditures as evidenced by a significantly smaller value level ($0,000 < 0,05$). The results of this study identify that the effect of Regional Original Income on Regional Expenditure is greater than the effect of the General Allocation Fund on Regional Expenditures as evidenced by the PAD value of Regional Expenditures of 0.985 greater than the DAU coefficient of Regional Expenditures of 0.011. Therefore, in this study it can be concluded, there is no effect paper on the Regional Expenditures of the Surabaya City Government.

Keywords: General Allocation Funds (DAU), Regional Original Revenue (PAD), Regional Expenditures, Flypaper effect

ABSTRAK

Gambaran kemandirian daerah dalam era otonomi tercermin dalam kemampuan daerah di bidang sumber daya keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi sumber keuangan utama Pemda. Namun ternyata peningkatan transfer Pemerintah Pusat, terutama dana alokasi umum (DAU), memicu belanja yang lebih besar daripada

peningkatan pada PAD. Kondisi tersebut dinamakan fenomena *flypaper effect*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dan kemudian menganalisis *Flypaper effect*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Penentuan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel dengan sampling jenuh, dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2017. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dibuktikan dengan hasil nilai signifikan lebih besar ($0,914 > 0,05$), sedangkan Pendapatan Asli Daerah secara persial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dibuktikan dengan tingkat nilai signifikan lebih kecil ($0,000 < 0,05$). Secara simultan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dibuktikan dengan tingkat nilai signifikan lebih kecil ($0,000 < 0,05$). Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dibuktikan dengan nilai koefisien PAD terhadap Belanja Daerah sebesar 0,985 lebih besar dibandingkan nilai koefisien DAU terhadap Belanja Daerah sebesar 0,011. Oleh karena itu dalam penelitian ini dapat disimpulkan, tidak terjadi *Flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, *Flypaper effect*.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menggunakan model sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada suatu daerah untuk mengatur urusan pemerintah di daerahnya sendiri. Wewenang daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat itu disebut otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi Daerah di Indonesia dimulai secara efektif tanggal 1 Januari 2001. Untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan dari pemerintah pusat tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan. Namun dalam kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai

operasi utamanya sehari-hari yang oleh pemerintah daerah dilaporkan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Otonomi daerah memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan dana yang cukup besar sebagai modal awal menuju kemandirian pemerintah daerah. Sumber dana utama Pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di pakai untuk membiayai belanja modal dan pembangunanya. Namun dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari Pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Tujuan dari transfer itu adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan fiskal atas pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh Provinsi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan anta daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Umum relatif besar (Andri Tolu dkk, 2016). Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membelanjai biaya yang bersifat umum, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak hanya ditransfer untuk daerah tetapi juga digunakan untuk pos belanja pegawai dan untuk pembangunan insfratuktur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Mentayani et al (2012) Pendapatan Asli Daerah idealnya merupakan sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lainnya cenderung bersifat fluktuatif dan di luar pengendalian kewenangan daerah. Selain Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendapatan lain berupa dan perimbangan. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan program pembangunan daerah. Pendapatan asli

daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja-belanja daerah tersebut dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan atau disebut juga dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Fenomena utama dalam penelitian ini adalah *Flypaper Effect*, yang merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) daripada menggunakan kemampuan sendiri. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Mentayani et al. (2012) merupakan suatu kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang membelanjakan lebih banyak dan boros dengan menggunakan dana transfer atau Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena *Flypaper Effect* menurut Listiorini (2012) terjadi dalam dua versi. Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang tinggi dari elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian mengenai *Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Jesiska (2018) dan Melia Gita Cahyani (2018) menunjukkan bahwa penelitian tersebut memperoleh hasil yang konsisten. Yaitu menemukan bahwa terjadi *Flypaper effect* pada belanja daerah. Hasil penelitian keduanya menunjukkan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lainnya, karena tiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri baik dari sisi geografis, kehidupan masyarakat maupun kondisi ekonominya.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba membahas mengenai apakah terjadi fenomena *Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya, sehingga peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul: **“PENGARUH FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi kasus periode 2011-2017)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Menurut UU no 9 tahun 2015 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Desentralisasi atau yang dikenal otonomi daerah sangat populer di Indonesia pasca bergulirnya reformasi. Daerah diberikan kewenangan (authority). Untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa harus dikomandoi oleh pusat. Konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal menghambat pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian tuntutan masyarakat dapat di wujudkan secara nyata dan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak di abaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional

Flypaper effect

Flypaper Effect adalah respon atau merupakan suatu tanggapan langsung dari Pemerintah daerah dalam menyingkapi transfer dana dalam bentuk dana perimbangan khususnya DAU yang di wujudkan pada anggaran belanja daerah. Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut dengan flypaper effect (Oates, 1999: 1129) dalam Sidiq (2016)

Flypaper Effect merupakan fenomena ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari pendapatan transfer Pusat (transfer tidak bersyarat) daripada pendapatan asli dari daerahnya. Di temukannya fenomena *Flypaper*

Effect mengidentifikasi bahwa Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan publik (belanja daerah) senantiasa lebih merespon dari pendapatan transfer dan kurang melakukan optimalisasi pendapatan asli daerahnya.

Maimunah (2006) dalam Adiputra (2014) menyatakan bahwa *Flypaper effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan kemampuan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kecenderungan menggunakan dana dari pemerintah pusat dibandingkan menggunakan dana dari pendapatan daerah yang dimiliki atau yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena *Flypaper Effect* membawa implikasi bahwa akan meningkatkan belanja pemerintah daerah dibandingkan dengan transfer dana dari pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 (Pasal 1 No 11) Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan Halim (2016:127) Menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri *netto* yang telah ditetapkan dalam APBN.

Sedangkan untuk kapasitas fiskal dicerminkan dengan faktor dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Dana Alam. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No.23 tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Hastuti (2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dalam industrinya dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2014:101) Pendapatan Asli (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 3, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan dalam Mahsun et al. (2011:83) bahwa belanja daerah diklarifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan program dan kegiatan dibagi menjadi kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung. Listiorini (2012) menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah jumlah anggaran pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung terkait dan berhubungan dengan program atau kegiatan.

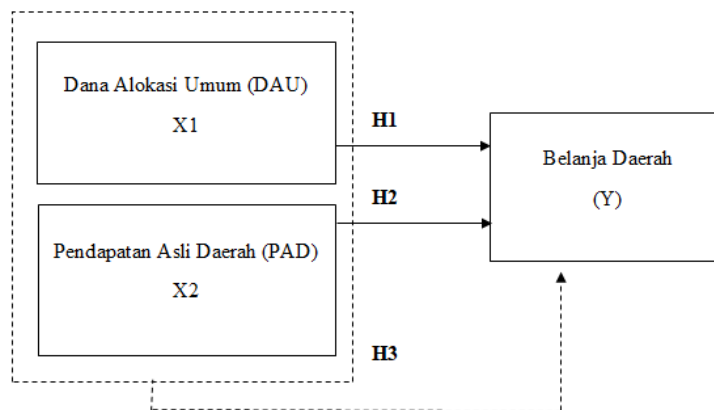
Menurut Priyo (2009;4) dalam Gorahe (2014), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang

besarannya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik berasal dari penerimaan sendiri maupun transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal.

Belanja daerah menurut Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



HIPOTESIS

- H1 : Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kota Surabaya.
- H2 : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kota Surabaya.
- H3 : Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dan kemudian menganalisis *Flypaper effect*. Dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS 25. Teknik pengujian hipotesis menggunakan Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Multikolonieritas, dan Uji Autokolerasi. Dan Teknik pengujian hipotesis Uji Regresi Linier Berganda:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

a = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi dari setiap variabel independen

X_1 = Dana Alokasi Umum

X_2 = Pendapatan Asli Daerah

e = Estimasi *error* dari masing-masing variabel

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Uji t (Persial) Menurut Imam Ghozali (2013:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau per variabel.
2. Uji F (Simultan) Menurut Imam Ghozali (2013:98) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000371
	Std. Deviation	178758323675.29410
Most Extreme Differences	Absolute	.000
	Positive	.221
	Negative	.132
Test Statistic		-.221
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan uji yang telah dilakukan diperoleh dari nilai asymp sig (2-tailed) sebesar 0,200 diatas 5% ($\alpha = 0,05$). Berdasarkan hasil data tersebut maka model persamaan regresi uji asumsi klasik normalitas berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	93065340	533308671		1.745	.156		
		0576.891	050.876					
	Dana Alokasi Umum	.081	.709	.011	.115	.914	.414	2.414
	Pendapatan Asli Daerah	.014	.001	.985	10.740	.000	.414	2.414

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada variabel yang ditunjukkan dengan indikator Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai tolerance 0,414 diatas 0,01 dan nilai VIF 2,414 kurang dari 10,00, Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

3. Uji Autokolerasi

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.993 ^a	.986	.979	218933340139.87515	2.233

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Waston sebesar 2,233. Artinya nilai tersebut besar atau diatas 2. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-Waston tidak ada autokorelasi negatif. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.5
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	930653400576.8	53330867105		1.745	.156
		91	0.876			
	Dana Alokasi Umum	.081	.709	.011	.115	.914
	Pendapatan Asli Daerah	.014	.001	.985	10.740	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

- a. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,081. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah Dana Alokasi Umum maka semakin tinggi Belanja

Daerah. Setiap kenaikan 1 Rupiah Variabel Dana Alokasi Umum maka akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 0,081.

- b. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah bernilai 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi Belanja Daerah. Setiap kenaikan 1 Rupiah variabel Pendapatan Asli Daerah akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 0,014.

Hasil Uji t (Persial)

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah secara persial. Hal ini dibuktikan dengan hasil t-hitung sebesar 0,115 lebih kecil dari t-tabel 2,776 dengan tingkat nilai signifikan lebih besar ($0,914 > 0,05$). Artinya H_0 diterima H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh signifikansinya variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah secara persial. Hal ini dibuktikan dengan hasil t-hitung sebesar 10,740 lebih besar dari t-tabel 2,776 dengan tingkat nilai signifikan lebih kecil ($0,000 < 0,05$). Artinya H_0 ditolak H_a diterima, berarti ada pengaruh signifikansinya variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 4.7

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1356676448443146 2000000000.000	2	6783382242215731 000000000.000	141.522	.000 ^b
	Residual	1917272296992091 000000000.000	4	4793180742480227 5000000.000		
	Total	1375849171413067 0000000000.000	6			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variable independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD). Hal ini dibuktikan dengan nilai

F-hitung sebesar 141.522 lebih besar dari F-tabel 6.94 dengan nilai signifikan lebih kecil ($0,000 < 0,05$).

PEMBAHASAN HASIL TEMUAN PENELITIAN.

1. Hipotesis 1 (Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya)

Pada hasil pengujian ini diketahui nilai t-hitung sebesar 0,115 lebih kecil dari t-tabel 2,776 dengan tingkat nilai signifikan lebih besar ($0,914 > 0,05$) dalam pengujian Uji t. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Surabaya. Nilai koefisien Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah sebesar 0,081, artinya jika Dana Alokasi Umum mengalami penambahan 1 rupiah maka akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 0,081 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Ketika Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan, Belanja Daerah juga mengalami peningkatan. Tetapi besarnya peningkatan Dana Alokasi Umum tidak sebanding dengan peningkatan Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan.

Menurut PP No 55 Tahun 2005 Pasal 1 no 22 dan 23, Tujuan dibentuknya Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemertaan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka Deseentralisasi. Contoh nyata Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membiayai biaya yang bersifat umum, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak hanya ditransfer untuk daerah tetapi juga digunakan untuk pos belanja pegawai dan untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan tujuan dibentuknya Dana Alokasi Khusus untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Contoh nyata Dana Alokasi Khusus merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

2. Hipotesis 2 (Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya)

Pada hasil pengujian diketahui nilai t-hitung sebesar 10,740 lebih besar dari t-tabel 2,776 dengan tingkat nilai signifikan lebih kecil ($0,000 < 0,05$) dalam pengujian Uji t. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah bernilai 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi Belanja Daerah. Setiap kenaikan 1 Rupiah variabel Pendapatan Asli Daerah akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 0,014.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan program pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah idealnya merupakan sumber-sumber pendapatan pokok daerah. Pemerintah daerah dalam menganggarkan Belanja Daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat Belanja Daerah untuk melaksanakan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

3. Hipotesis 3 (Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya)

Pada hasil pengujian ini diketahui nilai F-hitung sebesar 141.522 lebih besar dari F-tabel 6.94 dengan nilai signifikan lebih kecil ($0,000 < 0,05$) dipengujian Uji F. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variable independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Surabaya.

Nilai diatas memiliki arti bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Alasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi karena faktor ekonomi, publik dan sosial, namun pada umumnya karena faktor financial dan kebutuhan fiskal. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atas pengeluaran.

4. Fenomena *Flypaper Effect*

Flypaper effect merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros menggunakan dana transfer atau DAU dari pada menggunakan dana sendiri atau PAD. Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect* pada keuangan pemerintah daerah maka harus dibandingkan besarnya pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah dengan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang tampak pada Tabel 4.5 menunjukkan besarnya nilai koefisien standar beta dari DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah. Didapat nilai koefisien DAU terhadap Belanja Daerah sebesar 0,011 sedangkan nilai koefisien PAD terhadap Belanja Daerah sebesar 0,985. Hal ini berarti pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah.

Karena nilai koefisien pengaruh PAD lebih besar dari nilai koefisien pengaruh DAU berarti tidak terjadi *flypaper effect* pada keuangan daerah pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2011-2017.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki pola ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya PAD dari seluruh pendapatan Pemerintah Kota Surabaya dan perkembangan DAU yang tidak terlalu besar. Dengan demikian kondisi keuangan Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik dan termasuk mandiri dari segi keuangannya.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-hitung sebesar 141.522 lebih besar dari F-tabel 6.94 dengan nilai signifikan lebih kecil ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil pengujian secara persial dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan hasil t-hitung sebesar 0,115 lebih kecil dari t-tabel 2,776 dengan tingkat nilai signifikan lebih besar ($0,914 > 0,05$). Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan hasil t-

hitung sebesar 10,740 lebih besar dari t-tabel 2,776 dengan tingkat nilai signifikan lebih kecil ($0,000 < 0,05$). Dari analisis *Flypaper effect* dapat disimpulkan tidak terjadi fenomena *Flypaper effect* pada Belanja Daerah Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien standar beta PAD terhadap Belanja Daerah sebesar 0,985 lebih besar dibandingkan nilai koefisien standar beta DAU terhadap Belanja Daerah sebesar 0,011. Hal ini berarti pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah. Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki pola ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya PAD dari seluruh pendapatan Pemerintah Kota Surabaya dan perkembangan DAU yang tidak terlalu besar. Dengan demikian kondisi keuangan Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik dan termasuk mandiri dari segi keuangannya.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya agar selalu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi daerah diluar pajak daerah, seperti retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
2. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal kinerja terhadap keserasian belanja daerah menunjukkan bahwa Pemerintah lebih mengalokasikan sebagian besar belanjanya untuk Belanja Operasi (belanja tidak langsung) daripada Belanja Modal (belanja langsung). Artinya pemerintah lebih memprioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan daripada untuk pembangunan daerah. Sebaiknya pemerintah tidak hanya memprioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan belanja untuk pembangunan daerah. Atau setidaknya seimbang antara belanja untuk pemerintahan (belanja tidak langsung) dan belanja untuk pembangunan daerah (belanja langsung).
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang berbeda baik itu yang berada dipulau Jawa, dan disarankan agar memperluas periode penelitian lebih diperpanjang, yaitu lebih dari 7 tahun, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik dan melibatkan variabel-variabel independen (selain DAU dan PAD) misalnya total Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus, lain-lain pendapatan yang sah, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2016, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat
- Adi Putra, 2014. **Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Karangasem**. Jurnal Ilmiah akuntansi dan humanika. Universitas Pendidikan Ganesha
- Andri Tolu dkk. 2016. **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kota Pada Bitung)**. Jurnal Berkala Ilmiah. Universitas Sam Ratulangi
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Diyana, Rochima. 2018. **Pengaruh Budgetary Goal Characteristics Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Batang dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderasi**. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro
- Gorahe Irdha, Masinambow Vecky, Engka Daisy, 2014. **Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya di provinsi sulawesi utara**. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2014. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, Indhi. 2011. **Analaisis Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota dan Kabupaten Semarang**. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi: UNDIP. Semarang.
- Jogiyanto, Hartono. 2006. **Analisis & Desain Sistem Informasi : Pendekatan. Terstruktu Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis**. Yogyakarta : Andi Offset.
- Kartika Ika dan Suzan Leny. 2015. **Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Banten Tahun 2008-2012)**. Jurnal. Universitas Telkom
- Kurnia, E. Daddy. 2013. **Analisis Flypaper Effect berdasarkan Pemerataan Indeks Kemampuan Keuangan & Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur**. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. 2013
- Listiorini. 2012. **Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara**. Jurnal Keuangan dan Bisnis
- Mahsun, Moh. Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2011. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: BPF.
- Mentayani, Ida. Hayati, Nurul. dan Rusmanto. 2012. **Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kota dan Kabupaten di Proviansi Kalimantan Selatan**. Jurnal Spread.
- Nugroho, Ell Andreas. 2017. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2014**. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rokhaniyah, Sito dan Nugroho, Muh Rudi. 2011. **Analisis Flypaper Effect pada Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2006-2008.** Fokus Ekonomi.
- Sidiq, Muhammad.* 2016. **Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (Ikk) Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia.** Tesis. Universitas Lampung Bandar Lampung
- Sugiyono,* 2013, **Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.** Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

JEA17

JURNAL EKONOMI AKUNTANSI, Hal 49-66 Volume 4. Nomer 1. April 2019

JEA17

JURNAL EKONOMI AKUNTANSI, Hal 49-66 Volume 4. Nomer 1. April 2019
